



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2019

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui implementasi e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyusun Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- KEDUA : Target Kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan Hak Asasi Manusia;
  3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
- KETIGA : Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan Target Kinerja.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Target Kinerja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Pelaporan sebagaimana diktum keempat diunggah melalui aplikasi Target Kinerja secara berkala pada:
- a. Bulan Ketiga (B03) tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2020;
  - b. Bulan Keenam (B06) tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2020;
  - c. Bulan Kesembilan (B09) tanggal 28 September sampai dengan 5 Oktober 2020;
  - d. Bulan Keduabelas (B12) tanggal 1 Desember sampai dengan 10 Desember 2020.
- KEENAM : Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Target Kinerja yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- KEDUA : Target Kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan Hak Asasi Manusia;
  3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
- KETIGA : Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan Target Kinerja.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Target Kinerja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Pelaporan sebagaimana diktum keempat diunggah melalui aplikasi Target Kinerja secara berkala pada:
- a. Bulan Ketiga (B03) tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2020;
  - b. Bulan Keenam (B06) tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2020;
  - c. Bulan Kesembilan (B09) tanggal 28 September sampai dengan 5 Oktober 2020;
  - d. Bulan Keduabelas (B12) tanggal 1 Desember sampai dengan 10 Desember 2020.
- KEENAM : Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Target Kinerja yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- KEDUA : Target Kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan Hak Asasi Manusia;
  3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
- KETIGA : Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan Target Kinerja.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Target Kinerja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Pelaporan sebagaimana diktum keempat diunggah melalui aplikasi Target Kinerja secara berkala pada:
- a. Bulan Ketiga (B03) tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2020;
  - b. Bulan Keenam (B06) tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2020;
  - c. Bulan Kesembilan (B09) tanggal 28 September sampai dengan 5 Oktober 2020;
  - d. Bulan Keduabelas (B12) tanggal 1 Desember sampai dengan 10 Desember 2020.
- KEENAM : Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Target Kinerja yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- KEDUA : Target Kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan Hak Asasi Manusia;
  3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
- KETIGA : Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan Target Kinerja.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Target Kinerja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- KELIMA : Pelaporan sebagaimana diktum keempat diunggah melalui aplikasi Target Kinerja secara berkala pada:
- a. Bulan Ketiga (B03) tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April 2020;
  - b. Bulan Keenam (B06) tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2020;
  - c. Bulan Kesembilan (B09) tanggal 28 September sampai dengan 5 Oktober 2020;
  - d. Bulan Keduabelas (B12) tanggal 1 Desember sampai dengan 10 Desember 2020.
- KEENAM : Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Target Kinerja yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
YASONNA H. LAOLY

**TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020**

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>						
1.	Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya Satuan Kerja yang memperoleh nilai RB Sangat Baik (>70-80)	Meningkatnya jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Nilai RB Sangat Baik (>70-80)	B03: 1. Pembentukan Tim RB Satuan Kerja 2. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) 3. Persiapan Pemenuhan data dukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020 4. Persiapan Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020	B03: 1. SK Tim RB dan Tim Pembangunan ZI 2. Laporan Persiapan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: 1. Tindak lanjut internalisasi pelaksanaan <i>Road Map</i> Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja Tahunan RB Tahun 2020 2. Internalisasi Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB 3. Internalisasi Aplikasi E-RB 4. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 5. Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020	B06: Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: 1. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 2. Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020	B09: Laporan	
				B12: 1. Pemenuhan data dukung PMPRB tahun 2020 2. Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan RB tahun 2020	B12: Laporan	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
2.	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan peningkatan nilai maturitas SPIP	1. Terlaksananya SPIP dengan fokus kepada Peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan maturitas SPIP	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP Kemenkumham terdefinisi dengan interval skor 3 menuju 4	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan/ Pembaharuan Satgas SPIP di Kantor wilayah dan UPT</li> <li>Sosialisasi Target Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor Wilayah dan UPT oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Tim Satgas SPIP</li> <li>Laporan hasil sosialisasi</li> </ol>	
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan Penguatan Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor Wilayah dan UPT oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan</li> <li><i>Self assesment</i> penilaian maturitas SPIP Kanwil dan UPT</li> </ol>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil pendampingan penguatan</li> <li>Hasil Penilaian <i>Self Assesment</i> Kanwil dan UPT</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: Monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Kanwil dan UPT	B09: Laporan monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP	
				B12: Monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Kanwil dan UPT	B12: Laporan monev pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP	
		2. Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018	B03 : Persiapan pendampingan MR: 1. Berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. <i>Workshop/Rapat</i> Dalam Kantor (RDK)	B03 : Notula/Laporan kegiatan persiapan pendampingan MR	
				B06: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di lingkungan Kantor	B06: Laporan pendampingan penerapan MR	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		
				B09: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B09: Laporan pendampingan penerapan MR	
				B12: Evaluasi pelaksanaan MR	B12: Laporan kompilasi evaluasi pelaksanaan MR	
3.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen dan BPK	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen dan BPK	B03: 1. Inventarisasi data temuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Itjen 2. Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B03: 1. Laporan TLHP 2. Bukti Penyetoran	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B06: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran	
				B09: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B09: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran	
				B12: 1. Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen 2. Laporan evaluasi	B12: 1. Laporan TLHP 2. Bukti penyetoran 3. Laporan evaluasi	
4.	Optimalisasi Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis	Terlaksananya Pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis teknologi informasi	Tercapainya pelaporan LHKASN 100%	B03: 1. Persiapan evaluasi pelaporan LHKASN 2. Evaluasi laporan LHKASN triwulan I	B03: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan I	
				B06: Evaluasi laporan LHKASN triwulan II	B06: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan II	
				B09: Evaluasi laporan LHKASN triwulan III	B09: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan III	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	teknologi informasi			B12: Evaluasi laporan LHKASN triwulan IV dan Kompilasi	B12: Laporan evaluasi LHKASN Triwulan I dan Kompilasi	
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>						
5.	Peningkatan citra positif Kementerian Hukum dan HAM	Tersebar nya informasi kementerian Hukum dan HAM secara terstruktur, masif, dan sistematis	Informasi Kementerian Hukum dan HAM disebar kan di seluruh media sosial (FB, Instagram,dan Twitter) seluruh Satuan Kerja	B03: Penyampaian data akun media sosial (FB, Instagram, dan Twitter) seluruh satuan kerja di wilayah yang sudah terkoneksi dengan media sosial Kementerian Hukum dan HAM ke Sekretariat Jenderal	B03: Surat penyampaian akun media sosial (FB, Instagram,dan twitter) dan SK admin pengelola Satuan Kerja ke Sekretariat Jenderal cq Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama	
				B06: Menyebarkan 10 (sepuluh) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram,dan twitter) kantor wilayah dan UPT	B06: Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>B09: Menyebarkan 10 (sepuluh) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram, dan twitter) kantor wilayah dan UPT</p>	<p>B09: Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja</p>	
				<p>B12: Menyebarkan 5 (lima) narasi tunggal dari Biro Humas Hukum dan Kerja sama di seluruh media sosial (FB, Instagram, dan twitter) kantor wilayah dan UPT</p>	<p>B12: Laporan penyebaran narasi tunggal di media sosial (FB, Instagram, dan twitter) seluruh Satuan Kerja</p>	
6.	Peningkatan Disiplin pegawai terhadap kehadiran	Pegawai mematuhi aturan jam kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Disiplin sudah sesuai Peraturan yang berlaku</li> <li>2. Presentasi pegawai yang Tidak Masuk Kerja atau Terlambat tanpa keterangan</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai</li> <li>2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukuman disiplin (hukdis) dengan Itjen</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data hasil rekon</li> <li>2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat</li> <li>3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			dibawah 15% untuk masing-masing unit	B06: 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen	B06: 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai	
				B09: 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham 2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen	B09: 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat 3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai	
				B12: 1. Pelaksanaan Supervisi penegakan disiplin kehadiran pegawai Kanwil Kemenkumham	B12: 1. Data hasil rekon 2. Laporan hasil supervisi Unit Pusat	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				2. Pelaksanaan rekonsiliasi data hukdis dengan Itjen	3. Laporan evaluasi kehadiran pegawai	
7.	Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA. 2019</li> <li>Tersusunnya Laporan Keuangan Semester II T.A. 2019 sesuai dengan SAP</li> </ol>	<p>B03:</p> <p>Laporan Keuangan Semester II T.A. 2019</p>	
				<p>B06:</p> <p>Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020</p>	<p>B06:</p> <p>Notula Rapat Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020</p>	
				<p>B09:</p> <p>Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020 sesuai dengan SAP</p>	<p>B09:</p> <p>Laporan Keuangan Semester I T.A. 2020</p>	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulan III T.A. 2020 sesuai dengan SAP	B12: Laporan Keuangan Triwulan III T.A. 2020	
8.	Implementasi SIPaSTIKU	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) berdasarkan Dirsbursement Plan melalui SIPaSTIKU di Kantor Wilayah	Seluruh Kantor Wilayah menggunakan SIPaSTIKU	B03: Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (Januari-Maret) pada seluruh satker di Kantor Wilayah	B03: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU	
				B06: Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (April-Juni) pada seluruh satker di Kantor Wilayah	B06: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU	
				B09: Laporan Pelaksanaan PBJ per bulan (Juli-September) pada seluruh satker di Kantor Wilayah	B09: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU	
				B12: Laporan pelaksanaan PBJ per bulan (Oktober-	B12: <i>Screenshot</i> fitur laporan pada SI PaSTIKU	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Desember) pada seluruh satker di Kantor Wilayah		
9.	Mewujudkan Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI)	Terkoordinasinya pengembangan TI Kemenkumham baik dalam bidang Infrastruktur maupun aplikasi dalam sebuah <i>grand design</i> TI Kementerian	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi di unit utama dan Kanwil tidak tumpang tindih atau duplikasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran TI Kemenkumham	B06: Evaluasi TI di Kantor Wilayah  B09: Postur Anggaran TI tahun 2021 di Kantor Wilayah	Laporan evaluasi  RKA-KL Teknologi Informasi Kantor Wilayah	
10.	Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> pada Kantor Wilayah dan UPT	1. Terlaksananya Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> pada Kantor Wilayah dan UPT Kemenkumham	90% pegawai Kantor Wilayah dan UPT telah mendapatkan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i>	B03: Tahap persiapan : 1. Pedoman pelaksanaan Kemenkumham <i>Corporate University</i> 2. Penetapan peserta Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> 3. Penjadwalan pelaksanaan	B03: 1. Pedoman 2. SK Peserta Internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> 3. Jadwal pelaksanaan Internalisasi Kemenkumham	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				internalisasi <i>Corporate University</i>	<i>Corporate University</i>	
				B06: Pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi pegawai Kantor Wilayah	B06: Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi pegawai Kantor Wilayah	
				B09: Pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> pada Kepala dan pegawai UPT	B09: Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i> bagi Kepala dan pegawai UPT	
				B12: Evaluasi internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i>	B12: Hasil evaluasi yang diinput ke CBHRIS	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		2. Pelaksanaan kegiatan <i>Coaching</i> dan Mentoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bagi pejabat administrator dan Ka. UPT di Kanwil	90% pejabat administrator dan Ka. UPT di Kanwil memahami Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan <i>Coaching, coachee</i> dan Mentoring</li> <li>Penetapan <i>Coaching, coachee</i> dan Mentoring</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar hadir, dokumentasi dan notulensi</li> <li>SK Penetapan <i>Coach, Coachee</i> dan Mentor</li> </ol>	
				<p>B06:</p> Pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring bagi pegawai pejabat administrator di Kanwil	<p>B06:</p> Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring	
				<p>B09:</p> Pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring bagi pegawai Ka. UPT	<p>B09:</p> Daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan Mentoring	
				<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</li> </ol>	<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Capture</i> nilai Indikator Kinerja</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				2. Evaluasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> di Kanwil	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Hasil evaluasi pelaksanaan <i>Coaching</i> dan <i>Mentoring</i> di Kanwil yang di input ke dalam CBHRIS	
11.	Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019	90% proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 yang ditindaklanjuti di Kanwil	B03: Inventaris data proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil  B06: Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV di Kanwil	B03: Daftar proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil  1. Hasil kegiatan diinput ke CBHRIS 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni diklat PIM III dan IV tahun 2019 di Kanwil	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: Memberikan rekomendasi proyek perubahan yang dapat diimplementasikan	B09: Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala BPSDM	
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>						
12.	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang- undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasi an, pemantapan, dan pembulatan konsep produk hukum daerah	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah	Terlaksananya pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan pada masing- masing Kanwil Kemenkumham	B03: Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	B03: Laporan Koordinasi dengan melampirkan: 1. SK Zonasi Perancang Peraturan Perundang- Undangan 2. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota) 3. Daftar Hadir, Notula, dan Dokumentasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: Terharmonisasinya Produk hukum daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan Kantor Wilayah berdasarkan surat selesai pengharmonisasian dari Kepala Kantor Wilayah ke Pemerintah Daerah	B06: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi	
				B09: Terharmonisasinya Produk hukum daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan Kantor Wilayah berdasarkan surat selesai pengharmonisasian dari Kepala Kantor Wilayah ke Pemerintah Daerah	B09: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: Menyusun laporan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	B12: Laporan pengharmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah	
13.	Menciptakan kondisi/iklim ramah investasi yang responsif terhadap adanya tindak pidana pencucian uang	Implementasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) di Wilayah	Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) di Wilayah.	B03: 1. Pembentukan Tim 2. Rapat persiapan awal 3. Pemetaan data Pemilik Manfaat di wilayah	B03: 1. SK Tim 2. Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) 3. Matriks data pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: Diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah Periode I	B06: 1. Laporan Tim 2. Laporan Diseminasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)	
				B09: Diseminasi kebijakan pelaporan Pemilik Manfaat di Wilayah Periode II	B09: 1. Laporan Tim 2. Laporan Diseminasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)	
				B12: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Diseminasi	B12: 1. Laporan Evaluasi 2. Matriks Data pelaporan Pemilik Manfaat di	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					wilayah (setelah diseminasi)	
14.	Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten	Tercapainya pemahaman masyarakat tentang pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah	Meningkatnya pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum yang dapat mendukung peningkatan investasi di Wilayah	<p>B03: 1. Rapat Persiapan Awal 2. Pendataan jumlah badan hukum di Wilayah</p> <p>B06: <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) tentang Pedoman pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum Periode I</p> <p>B09: <i>Focus Group Discussion</i> tentang Pedoman pendaftaran/pengesahan Badan</p>	<p>B03: 1. Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi) 2. Matriks Data Jumlah Badan Hukum di Wilayah</p> <p>B06: Laporan FGD (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)</p> <p>B09: Laporan FGD (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Usaha Berbadan Hukum Periode II		
				B12: Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i>	B12: Laporan Evaluasi	
15.	Meningkatkan pengawasan notaris melalui pengenalan pengguna jasa notaris untuk menghindari praktik pencucian uang	Tercapainya pemahaman Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah	Meningkatnya pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah	B03: Rapat Persiapan Awal	B03: Laporan Persiapan awal (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi)	
				B06: Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah Periode I	B06: Laporan Rapat Koordinasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Undangan, Bahan Materi)	
				B09: Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD terkait teknis pengawasan terhadap penerapan	B09: Laporan Rapat Koordinasi (Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi,	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				PMPJ oleh Notaris di Wilayah Periode II	Surat Undangan, Bahan Materi)	
				B12: Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan MPW dan MPD	B12: Laporan Evaluasi	
16.	Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual (KI)	Kantor Wilayah mampu memetakan potensi KI di wilayahnya masing-masing	Terbentuknya Peta Potensi Kekayaan Intelektual sebagai dasar diseminasi	B03: Koordinasi dengan DJKI mengenai rezim KI yang akan diinventarisasi	B03: 1. Surat Penugasan 2. Laporan koordinasi dengan DJKI untuk menentukan penyusunan inventarisasi potensi KI yang ada di Kabupaten/Kota	
				B06: 1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi	B06: 1. Surat Penugasan 2. Laporan Koordinasi dengan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>Kekayaan Intelektual di wilayah</p> <p>2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah</p>	<p><i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di kabupaten/kota</p> <p>3. Laporan kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota sesuai dengan peta potensi</p>	
				<p>B09:</p> <p>1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di wilayah</p> <p>2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah</p>	<p>B09:</p> <p>1. Surat Penugasan</p> <p>2. Laporan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					3. Laporan kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota sesuai dengan peta potensi	
				B12: 1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di wilayah 2. Melakukan diseminasi sesuai dengan potensi KI di wilayah 3. Tersedianya Peta Potensi KI di wilayah	B12: 1. Surat Penugasan 2. Laporan Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> di wilayah untuk memastikan Potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota 3. Laporan kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten/Kota	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					sesuai dengan peta potensi 4. Dokumen Peta Potensi KI di wilayah	
17.	Meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Permohonan KI yang diajukan dari Provinsi/Kabupaten/Kota</li> <li>2. Peningkatan jumlah data di Kekayaan Intelektual Komunal pada pusat data nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Jumlah Permohonan KI di Provinsi/Kabupaten/Kota</li> <li>2. Meningkatnya Jumlah inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten/Kota/Provinsi</li> </ol>	<p>B03: Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas dalam mempersiapkan <i>draft</i> Perjanjian Kerjasama (PKS) meningkatkan permohonan pendaftaran KI dan inventarisasi KIK</p> <p>B06: 1. Penandatanganan PKS 2. Pelaksanaan PKS/pendampingan</p>	<p>B03: <i>Draft</i> PKS Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas</p> <p>B06: 1. PKS yang sudah ditandatangani 2. Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: Pelaksanaan PKS/pendampingan	B09: Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	
				B12: 1. Pelaksanaan PKS/pendampingan 2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PKS	B12: 1. Laporan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama 2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi	
18.	Optimalisasi pemetaan potensi Pelanggaran kekayaan Intelektual dan Pengawasan Indikasi Geografis (IG) di Wilayah	1. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi daerah berpotensi terdapat pelanggaran kekayaan intelektual 2. Menjamin konsistensi mutu produk IG	1. Tersedianya peta Potensi pelanggaran KI 2. Terjaminnya konsistensi mutu produk IG sesuai dengan buku deskripsi IG	B03: Koordinasi Kantor Wilayah dengan aparaturnya penegak hukum untuk menentukan indikator wilayah yang berpotensi terdapat pelanggaran KI  B06: 1. Pelaksanaan kegiatan terkait Penyusunan <i>Draft Database</i>	B03: Laporan hasil Koordinasi  B06: 1. Laporan Pelaksanaan kegiatan terkait	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>Inventarisasi wilayah berpotensi pelanggaran KI</p> <p>2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah / Masyarakat Pengguna Indikasi Geografis (MPIG)</p>	<p>Penyusunan <i>Draft Database</i></p> <p>Inventarisasi wilayah berpotensi terdapat pelanggaran KI</p> <p>2. Laporan koordinasi</p>	
				B09: Inventarisasi wilayah berpotensi terjadinya pelanggaran KI	B09: Laporan koordinasi dengan aparaturnya penegak hukum di wilayah	
				B12: Peta wilayah yang berpotensi terjadinya pelanggaran KI	B12: Laporan ke DJKI terkait <i>Database</i> wilayah yang berpotensi terdapat pelanggaran KI	
19.	Meningkatkan Koordinasi dengan <i>Stakeholders</i>	Terlaksananya penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM	Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh instansi	B03: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang	B03: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	Dalam Rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM	oleh instansi terkait/pemangku kepentingan	terkait/pemangku kepentingan	belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada tahun sebelumnya	dengan instansi terkait/pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM	
				B06: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan I	B06: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>B09: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan II</p>	<p>B09: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan; 2. Laporan penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM</p>	
				<p>B12: Tindak lanjut dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait/pemangku kepentingan pada Triwulan III</p>	<p>B12: 1. Surat tanggapan/hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait/ pemangku kepentingan 2. Laporan penanganan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM	
20.	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah presiden	Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah presiden	Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia	B03: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM 2019 Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Bimtek bagi pemerintah daerah (provinsi, kab/kota) tentang Aksi HAM Daerah 3. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B03: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2019 2. Laporan Bimtek 3. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B06: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B04 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	
				B09: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B09: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B08 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: 1. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	B12: 1. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B12	
21.	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM	B03: 1. Pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan) 2. Bimtek Permenkumham	B03: 1. Laporan hasil pemetaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				tentang Kabupaten/Kota Peduli HAM	2. Laporan Bimtek	
				B06: 1. Notifikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota tentang pelaporan indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	B06: 1. Surat notifikasi 2. Berita acara pemeriksaan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: 1. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	B09: 1. Berita acara pemeriksaan	
				B12: 1. Notifikasi hasil penilaian kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Evaluasi pelaksanaan pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM	B12: 1. Surat notifikasi 2. Laporan Evaluasi	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
22.	Mendorong terwujudnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM	Terintegrasinya materi muatan HAM dalam Rancangan Produk Hukum Daerah	Dokumen analisis dan rekomendasi materi muatan HAM dalam Rancangan Produk Hukum Daerah	B03: Pemetaan Rancangan Produk Hukum Daerah dalam Program Legislasi Daerah yang terkait dengan substansi HAM	B03: Dokumen Pemetaan Rancangan Produk Hukum Daerah dalam Program Legislasi Daerah yang terkait dengan substansi HAM	
				B06: Analisis Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	B06: Dokumen Analisa Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	
				B09: <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	B09: Laporan hasil FGD Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	
				B12: Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	B12: Dokumen Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
23.	Pembentukan Pos Yankomas di UPT	Terbentuknya Pos dan Petugas Pos Yankomas di seluruh UPT	SK Pembentukan dan Pelaksana Pos Yankomas di seluruh UPT	B03 : Pemetaan Pos Yankomas di Provinsi/Kabupaten/ Kota	B03: Laporan Peta Pos Yankomas	
				B06: Sosialisasi kepada UPT yang belum membentuk Pos Yankomas	B06: Dokumentasi kegiatan Sosialisasi	
				B09: Pembentukan dan Pengukuhan Pos Yankomas di UPT	B09: Kompilasi Surat Keputusan Pembentukan Pos Yankomas	
				B12: Bimtek bagi Pelaksana Pos Yankomas	B12: Dokumentasi Pelaksanaan Bimtek	
24.	Terintegrasinya Dokumen Hukum Daerah dalam <i>Database</i> Dokumen Hukum Nasional	Terintegrasinya <i>website</i> Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Tingkat Daerah (Provinsi,	Bertambahnya jumlah Anggota JDIHN di tingkat daerah yang terintegrasi dengan portal <a href="http://jdihn.go.id">jdihn.go.id</a>	B03: Pemetaan Anggota JDIHN di Tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan, dan Perguruan Tinggi	B03: Laporan pemetaan Anggota JDIHN	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan, dan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta) dengan portal jdihn.go.id		Negeri/Perguruan Tinggi Swasta)		
				B06: Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Anggota JDIHN di tingkat daerah	B06: Laporan Pelaksanaan Kegiatan	
				B09: Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Anggota JDIHN di tingkat daerah	B09: Laporan Hasil Evaluasi	
				B12 : Penyampaian Laporan Pengelolaan JDIH Kantor Wilayah sesuai dengan Permenkumham No. 8 Tahun 2019 melalui aplikasi <i>e-reporting</i> JDIHN	B12: Laporan Pengelolaan JDIH Kantor Wilayah	
25.	Tersedia Perpustakaan Hukum <i>online</i> di setiap kantor wilayah	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan hukum secara <i>online</i> di lingkungan Kantor	Pemanfaatan Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i> di	B03: Pengolahan Koleksi Perpustakaan (Input Data Koleksi Perpustakaan) dalam	B03: Laporan Hasil Pengolahan Koleksi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		Wilayah melalui Aplikasi ILDIS / JDIH Kanwil	lingkungan Kantor Wilayah	aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil		
				B06: 1. Pengolahan Koleksi Perpustakaan (Input Data Koleksi Perpustakaan) dalam Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil 2. Promosi Layanan Perpustakaan <i>Online</i> pada JDIH Kanwil melalui Akun Media Sosial	B06: Laporan Pengolahan dan Promosi Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i>	
				B09: Statistik Jumlah Pemustaka <i>Online</i> yang memanfaatkan Layanan Informasi Perpustakaan pada Aplikasi ILDIS / JDIH Kanwil	B09: Laporan Pemanfaatan JDIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan Hukum <i>Online</i>	
				B12: Melakukan evaluasi Pemanfaatan Aplikasi	B12: Laporan Hasil Evaluasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				ILDIS / JDIIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan <i>Online</i> di lingkungan Kantor Wilayah		
26.	Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terkait Pemberdayaan UMKM dan/atau Cipta Lapangan Kerja	Termanfaatkannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah oleh pemangku kepentingan	Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah	B03: Terinventarisirnya semua produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi	B03: Daftar produk hukum daerah objek analisis dan evaluasi	
				B06: Penggunaan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum (BPHN) terhadap produk hukum daerah dalam rangka pelaksanaan analisis dan evaluasi	B06: Pengisian dokumen (matriks) sesuai dengan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum	
				B09: Penyusunan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada BPHN	B09: Laporan akhir berisi dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				dan kepada Biro/Bagian Hukum di Sekretariat Daerah		
27.	Pengawasan dan Perluasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditandatanganinya Kontrak Bantuan Hukum</li> <li>2. Tersusunnya SK Panitia Pengawas Daerah</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani pada bulan Januari</li> <li>2. SK Panitia Pengawas Daerah</li> </ol>	
				<p>B06:</p> <p>Sosialisasi/Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk perluasan pemberian bantuan hukum melalui pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah</p>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen rapat sosialisasi/koordinasi (undangan, notula, daftar hadir, dokumentasi)</li> <li>2. Laporan Kegiatan Sosialisasi/koordinasi dengan pemerintah daerah untuk</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					<p>perluasan pemberian bantuan hukum melalui pembentukan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah</p>	
				B09: Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah	B09: 1. Laporan Pemantauan dan Evaluasi 2. Isian kuesioner Pemantauan dan Evaluasi yang ditandatangani Penerima Bantuan Hukum	
28.	Kajian Hukum dan HAM di wilayah dengan tema:	Rekomendasi hasil kajian sebagai data awal (data sekunder) penelitian Badan Penelitian dan	Termanfaatkannya Rekomendasi hasil kajian sebagai data awal (data sekunder) penelitian	B03: 1. Tersusunnya SK Tim Kajian 2. Usulan proposal Kajian	B03: 1. SK Tim Kajian 2. Surat Usulan dan Proposal Kajian	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	<p>1. Kesiapan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Menuju Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Corporate University</i></p> <p>2. Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	<p>3. Persetujuan Proposal Kajian yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Terlaksananya presentasi proposal Kajian</p>	<p>3. Bukti Persetujuan Proposal Kajian yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>4. Bahan presentasi proposal Kajian (format power point)</p> <p>5. Notula dan daftar hadir kegiatan Presentasi Proposal Kajian</p> <p>6. Foto dokumentasi kegiatan</p>	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					Presentasi Proposal Kajian	
				B06: 1. Pelaksanaan pengumpulan data lapangan Kajian 2. Pengolahan dan analisa data lapangan Kajian 3. Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian dengan mengundang <i>stakeholders</i> 4. Penyampaian Laporan Akhir Kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	B06: 1. Hasil Data Lapangan Kajian 2. <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian 3. Bahan Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian (ppt) 4. Notula dan Daftar hadir kegiatan Presentasi <i>Draft</i> Laporan Akhir Kajian yang melibatkan <i>stakeholders</i> 5. Laporan Akhir Kajian 6. <i>Capture</i> Bukti Penyampaian Laporan Akhir Kajian kepada	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi SISUMAKER/ <i>Email</i>	
				B09: Evaluasi hasil kajian yang dimanfaatkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	B09: Laporan Rencana Aksi Pemanfaatan Hasil Kajian	
29.	Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Laporan Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	B03: Terbitnya SK TIM Analisis kebijakan dan <i>reporting</i> berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	B03: SK Tim Analisis kebijakan dan <i>reporting</i> berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: Tersusunnya analisis kebijakan dan <i>reporting</i> dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	B06: Laporan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	
				B09: Tersusunnya analisis kebijakan dan pelaporan SIPKUMHAM	B09: Laporan analisis kebijakan dan pelaporan SIPKUMHAM	
				B12: 1. Tersusunnya analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM 2. Evaluasi pelaksanaan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM	B12: 1. Laporan analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM 2. Laporan evaluasi analisis kebijakan dan <i>reporting</i> SIPKUMHAM	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
<b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b>						
30.	Percepatan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan guna penanganan over kapasitas <i>overstaying</i> dan peningkatan keterampilan narapidana melalui kerjasama	1. Menurunnya jumlah <i>overstaying</i> melalui penguatan data dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	Penanganan <i>overstaying</i> melalui penguatan data dan kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	B03: 1. SK penunjukan operator 2. Penyampaian keputusan bersama terkait pengembalian tahanan yang habis masa penahanan kepada para <i>stakeholder</i> 3. Melakukan supervisi dan verifikasi data tahanan dalam SDP 4. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> terkait tahanan yang <i>overstaying</i> 5. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa	B03: 1. SK Operator 2. Surat penyampaian Keputusan bersama 3. Laporan supervisi dan verifikasi data tahanan 4. Surat Pemberitahuan tahanan yang <i>overstaying</i> 5. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 6. Laporan rekapitulasi Berita acara	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				penahanan H-10, H-3, H-1 6. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan	pengembalian tahanan	
				B06: 1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1 2. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan	B06: 1. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 2. Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan	
				B09: 1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa	B09: 1. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				penahanan H-10, H-3, H-1 2. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan	penahan H-10, H-3, H-1 2. Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan	
				B12: 1. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada <i>stakeholder</i> yang akan habis masa penahanan H-10, H-3, H-1 2. Pengembalian tahanan kepada instansi yang melakukan penahanan 3. Monitoring dan evaluasi	B12: 1. Laporan rekapitulasi pemberitahuan kepada instansi penahan H-10, H-3, H-1 2. Laporan rekapitulasi Berita acara pengembalian tahanan 3. Laporan monitoring dan evaluasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		2. Penanganan overkapasitas melalui pemberian hak kepada Narapidana secara <i>online</i>	Penanganan overkapasitas melalui pemberian hak kepada Narapidana secara <i>online</i>	B03: 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat 2. Inventarisasi data narapidana yang akan mendapatkan remisi dan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan	B03: 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi 2. Data Inventarisasi 3. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 4. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 5. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Cuti Bersyarat tahun 2020 3. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 4. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> tepat waktu. 5. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i>		
				B06: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 100% tepat waktu. 3. Terlaksananya layanan <i>self service</i>	B06: 1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i>	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i>	3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana	
				B09: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara <i>online</i>	B09: 1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: 1. Terlaksananya pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Terlaksananya pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Terlaksananya layanan <i>self service</i> Remisi, PB, CB dan CMB secara Online	B12: 1. Laporan pelaksanaan pemberian Remisi secara <i>online</i> 2. Laporan pelaksanaan pemberian PB, CB dan CMB secara <i>online</i> 3. Laporan pelaksanaan penggunaan sidik jari narapidana	
		3. Meningkatnya kerjasama dengan para <i>stakeholder</i> dalam meningkatkan keterampilan narapidana	Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat	B03: 1. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan di Lapas Medium (kerjasama dengan	B03: 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI) 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lepas Medium		
				B06: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lepas Medium	B06: 1. Standar Pendidikan Vokasi Bagi Narapidana di Lepas (Agribisnis, Manufaktur dan Jasa) 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A)	
				B09: 1. Terlaksananya pelatihan keterampilan	B09: 1. Laporan pelaksanaan sosialisasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				(agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium	2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A)	
				B12: 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Terlaksananya pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa) di Lapas Medium	B12: 1. Laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan (Form 28 A)	
31.	Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap	1. Meningkatnya koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	Seluruh Lapas/Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B03: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B03: Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	
				B06: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi	B06: Laporan Pelaksanaan koordinasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	narkoba di Lapas/Rutan			pengamanan dengan instansi terkait	pengamanan dengan instansi terkait	
				B09: Seluruh Lapas/Rutan melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	B09: Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	
		2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kamtib yang bersumber dari dalam maupun dari luar	1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B03: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B03: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	
				B06: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B06: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B09: Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	
				B12: Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B09: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	
			2. Terlaksananya Sidak dan Tes Urin Bagi Petugas dan Narapidana	B03: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin	B03: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B06: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin	B06: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba	
				B09: 1. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Sidak 2. Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan Tes Urin	B09: 1. Laporan Pelaksanaan Sidak di seluruh Lapas dan Rutan 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kantib	B12: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	
		3. Lapas/Rutan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal	1. Kedisiplinan Petugas	B03: Seluruh Lapas dan Rutan telah membentuk Tim Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal)	B03: Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal)	
			2. Pelaksanaan Tugas Pengamanan area Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U)	B06: Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)	B06: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)	
			3. Pelaksanaan Layanan Kunjungan	4. Pelaksanaan Penjagaan	B09: Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan tugas dan fungsi satuan	B09: Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan fungsi satuan
			5. Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling			



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			6. Pelaksanaan Pengawasan 7. Pelaksanaan Penempatan Narapidana/Tahanan Dalam Kamar Hunian 8. Layanan Penyediaan Makanan dan Kebutuhan Dasar Lainnya 9. Layanan Registrasi dan Integrasi	operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)  B12: Monitoring dan Evaluasi	operasional kepatuhan internal (Satopspatnal)  B12: Laporan Pelaksanaan dan evaluasi	
32.	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP dan Anak	Tahanan/Narapidana/ Anak pecandu narkotika memperoleh Layanan Rehabilitasi Narkotika	Terselenggaranya layanan rehabilitasi narkotika bagi Tahanan, Narapidana dan Anak	B03: Pembentukan mentor rehabilitasi narkotika di tingkat wilayah  B06: Supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasarakatan	B03: Daftar mentor Rehabilitasi Narkotika  B06: Laporan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di wilayah	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B09: Supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di UPT Pemasarakatan	B09: Laporan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di wilayah	
				B12: Evaluasi tahunan penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika	B12: Laporan evaluasi tahunan penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika	
<b>DIVISI KEIMIGRASIAN</b>						
33.	Pelayanan Paspur Simpatik	Terwujudnya pelayanan Paspur RI kepada Masyarakat di luar hari kerja	Meningkatnya jumlah permohonan paspor yang terlayani di luar hari kerja Satuan Kerja Teknis	B03: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik	B03: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan		
				B06: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan	B06: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan	
				B09: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik	B09: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspur Simpatik	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan	4. Laporan Survei Indeks Kepuasan	
				B12: 1. Pemetaan dan Penjadwalan Hari Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 2. Pembentukan SK Tim 3. Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan 5. Evaluasi dan Rekomendasi	B12: 1. Dokumen Pemetaan dan Penjadwalan 2. Dokumen SK Tim 3. Laporan Pelaksanaan Pelayanan Paspor Simpatik 4. Laporan Survei Indeks Kepuasan 5. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi	
34.	Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian	1. Tersedianya Laporan Harian Intelijen (LHI)	Laporan Intelijen tepat waktu	B03: 1. Kadivim dan Ka.UPT mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tentang pembuatan LHI dan Perkiraan	B03: 1. Laporan pelaksanaan mengikuti sosialisasi LHI 2. SK Kakanwil	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Keadaan (Kirka) Intelijen 2. Penerbitan SK Kakanwil tentang pelaksanaan pembuatan LHI dan Perkiraan Keadaan Intelijen kepada Kadivim dan KaUPT 3. Pembuatan LHI dan Kirka Intelijen oleh Ka.UPT		
				B06: 1. KaUPT membuat LHI dan Perkiraan Keadaan Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT dengan menggunakan format dari Ditjen Imigrasi	B06: 1. Laporan pelaksanaan pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT 2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					Intelijen bulanan dari Kadivim	
				B09: 1. Ka.UPT membuat LHI dan Kirka Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT dengan menggunakan format dari Ditjen Imigrasi	B09: 1. Laporan pelaksanaan pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT 2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Kadivim	
				B12: 1. Ka.UPT membuat LHI dan Kirka Intelijen bulanan 2. Kadivim membuat kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari KaUPT dengan	B12: 1. Laporan pelaksanaan pembuatan produk LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Ka.UPT	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>menggunakan format dari Ditjen Imigrasi</p> <p>3. Evaluasi terkait Laporan Harian Intelijen dan Kirka Intelijen bulanan dari UPT</p>	<p>2. Laporan Kompilasi LHI dan Kirka Intelijen bulanan dari Kadivim</p> <p>3. Laporan Evaluasi terkait Laporan Harian Intelijen dan Kirka Intelijen bulanan</p>	
		2. Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindakan Hukum	<p>1. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Keimigrasian WNI dan WNA</p> <p>2. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum pada seluruh UPT yang dibawahahi</p>	<p>B03:</p> <p>1. Pemetaan orang asing</p> <p>2. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal</p> <p>3. Operasi Pengawasan (Prov/Kab/Kota) dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 25% Wilayah Kerja Kanwil</p>	<p>B03:</p> <p>1. Surat Pemberitahuan</p> <p>2. Surat Perintah Pengawasan</p> <p>3. Laporan pengawasan</p> <p>4. Laporan Sosialisasi</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				4. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing 25% Wilayah Kerja Kanwil  5. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 25 % Wilayah Kerja Kanwil		
				B 06: 1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal 2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 50% Wilayah Kerja Kanwil 3. Operasi pemantauan dan pendataan orang	B06: 1. Surat Pemberitahuan 2. Surat Perintah Pengawasan 3. Laporan pengawasan 4. Laporan Sosialisasi	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				asing di 50% Wilayah Kerja yang dibawah 4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 50% Wilayah Kerja Kanwil		
				B09: 1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal 2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 75% Wilayah Kerja Kanwil 3. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing di 75% Wilayah Kerja Kanwil	B09: 1. Surat Pemberitahuan 2. Surat Perintah Pengawasan 3. Laporan pengawasan 4. Laporan Sosialisasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di 75% Wilayah Kerja Kanwil		
				B12: 1. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal 2. Operasi Pengawasan dalam rangka penyidikan / penegakan hukum di 100% Wilayah Kerja Kanwil 3. Operasi pemantauan dan pendataan orang asing di 100% Wilayah Kerja Kanwil 4. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum Keimigrasian di	B12: 1. Surat Pemberitahuan 2. Surat Perintah Pengawasan 3. Laporan pengawasan 4. Laporan Sosialisasi 5. Laporan Evaluasi dan Rekomendasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				100% Wilayah Kerja Kanwil 5. Evaluasi dan Rekomendasi		